

Nama : Nazwa Devita Mawarni  
NPM : 2313031071  
Kelas : 2023 C  
Mata Kuliah : Ekonomi Pendidikan  
Dosen Pengampu : Dr. Pujiati, M.Pd.  
Dr. Meyta Pritandhari, M.Pd.  
Fanni Rahmawati, M.Pd.

---

---

## UJIAN AKHIR SEMESTER

---

---

### Soal 1 – Efisiensi Anggaran Pendidikan

Pemerintah Kabupaten A mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 30% dari APBD. Sebagian besar dana digunakan untuk pembangunan gedung sekolah baru, sedangkan pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan pengadaan media pembelajaran digital masih sangat terbatas. Setelah lima tahun, angka partisipasi sekolah meningkat, tetapi kualitas hasil belajar siswa tidak mengalami peningkatan signifikan.

1. Analisis penggunaan anggaran pendidikan pada kasus tersebut berdasarkan konsep efisiensi internal dan eksternal pendidikan.

**Jawab:**

Jika dianalisis menggunakan konsep Ekonomi Pendidikan, kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten A menunjukkan adanya ketimpangan yang besar antara efisiensi internal dan eksternal.

- Dari sisi efisiensi internal (bagaimana sistem pendidikan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menghasilkan output belajar yang optimal), kebijakan ini dinilai tidak efisien. Pemerintah daerah memang berhasil meningkatkan angka partisipasi sekolah melalui pembangunan fisik (gedung baru), tetapi mereka melupakan faktor kunci di dalam kelas. Karena dana untuk pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan media digital sangat terbatas, proses belajar-mengajar menjadi tidak berkualitas. Akibatnya, meskipun muridnya bertambah banyak, kualitas hasil belajar mereka *stuck* di tempat. Anggaran yang besar cenderung terserap pada aspek fasilitas, bukan pada esensi peningkatan mutu instruksional.
- Dari sisi efisiensi eksternal (bagaimana output pendidikan memberikan dampak nyata bagi masyarakat atau dunia kerja), dampaknya pun menjadi rendah. Efisiensi eksternal

baru tercapai jika lulusan memiliki keterampilan dan kompetensi yang relevan untuk membangun daerah atau bersaing di pasar kerja. Ketika hasil belajar siswa tidak mengalami peningkatan signifikan setelah lima tahun, lulusan yang dihasilkan kemungkinan besar tidak memiliki daya saing yang tinggi. Alokasi 30% dari APBD tersebut gagal ditransformasikan menjadi modal manusia (*human capital*) yang produktif bagi Kabupaten A.

2. Jelaskan dampak kebijakan tersebut terhadap kualitas sumber daya manusia.

**Jawab:**

Kebijakan yang terlalu berfokus pada pembangunan infrastruktur pendidikan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, tetapi dampaknya terhadap kualitas sumber daya manusia cenderung terbatas. Secara kuantitas, daerah ini mungkin terlihat sukses karena angka melek huruf atau angka partisipasi murni meningkat. Namun secara kualitas, kapasitas riil SDM lokal akan tertinggal. Tanpa adanya bekal literasi, numerasi, dan keterampilan digital yang mumpuni dari sekolah, generasi muda di Kabupaten A akan kesulitan beradaptasi dengan perkembangan zaman dan industri modern. Dampak jangka panjangnya, daerah ini berisiko terjebak dalam produktivitas yang rendah, tingginya angka pengangguran intelektual (lulus sekolah tapi tidak terserap kerja), serta sulitnya memutus rantai kemiskinan karena kualitas SDM yang dihasilkan tidak mampu menaikkan nilai tawar mereka di pasar tenaga kerja.

**Rekomendasi Kebijakan yang Lebih Efektif**

Untuk membenahi kondisi ini, Pemerintah Kabupaten A perlu melakukan reorientasi anggaran dari *input-oriented* (fokus pada fasilitas) menjadi *outcome-oriented* (fokus pada hasil belajar siswa). Berikut adalah langkah yang bisa diambil:

1) Realokasi Anggaran untuk Mutu Pembelajaran

Mengingat kapasitas gedung sekolah saat ini sudah mencukupi (terbukti dari naiknya partisipasi), porsi anggaran untuk pembangunan fisik harus dikurangi. Dana tersebut dialihkan secara masif untuk program sertifikasi dan pelatihan guru berbasis kompetensi, pembaruan kurikulum lokal, serta penyediaan fasilitas digital di sekolah-sekolah yang sudah ada.

2) Penerapan *Performance-Based Budgeting* (Anggaran Berbasis Kinerja)

Penyaluran dana pendidikan ke sekolah-sekolah tidak lagi hanya dihitung berdasarkan jumlah murid atau bangunan, melainkan dikaitkan dengan capaian mutu tertentu, seperti peningkatan nilai rapor pendidikan daerah atau kompetensi literasi-numerasi siswa.

3) Kemitraan untuk Efisiensi Eksternal

Pemerintah daerah perlu membangun kerja sama antara sekolah (terutama SMK atau SMA) dengan industri lokal maupun regional. Dengan begitu, kurikulum yang dikembangkan bisa *link and match* dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga efisiensi eksternal pendidikan dapat dicapai secara optimal.

## Soal 2 – Ketimpangan Akses Pendidikan

Sekolah di wilayah perkotaan memiliki laboratorium lengkap, akses internet cepat, dan guru profesional. Sebaliknya, sekolah di daerah pedesaan mengalami kekurangan guru, fasilitas minim, dan keterbatasan teknologi. Akibatnya, hasil ujian siswa di desa jauh lebih rendah dibandingkan siswa di kota.

1. Jelaskan bentuk ketimpangan pendidikan pada kasus tersebut.

**Jawab:**

Berdasarkan kasus yang dipaparkan, bentuk ketimpangan pendidikan yang terjadi antara wilayah perkotaan dan pedesaan dapat dikategorikan ke dalam tiga aspek utama:

1) Ketimpangan Fasilitas dan Sarana Prasarana (Input Pendidikan)

Sekolah di perkotaan memiliki kelengkapan fasilitas yang menunjang proses pembelajaran modern, seperti laboratorium yang memadai dan akses internet cepat. Sebaliknya, sekolah di pedesaan menghadapi keterbatasan sarana mendasar dan akses teknologi yang tertinggal.

2) Ketimpangan Distribusi Tenaga Pendidik (Kualitas Proses)

Terdapat kesenjangan mutu dan kuantitas guru. Wilayah perkotaan didukung oleh guru-guru profesional, sedangkan wilayah pedesaan justru mengalami kekurangan tenaga pendidik. Hal ini memengaruhi efektivitas penyampaian materi pelajaran di kelas.

3) Ketimpangan Hasil Belajar (Output Pendidikan)

Akumulasi dari ketimpangan input dan proses tersebut bermuara pada kesenjangan capaian akademik. Hal ini ditunjukkan oleh hasil ujian siswa di desa yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan siswa di kota.

2. Analisis dampak ekonomi jangka panjang dari ketimpangan pendidikan.

**Jawab:**

Dalam jangka panjang, ketimpangan pendidikan ini akan membawa dampak ekonomi yang signifikan dan bersifat sistemik bagi daerah tersebut:

1) Perluasan Kesenjangan Pendapatan dan Ketimpangan Sosial

Pendidikan adalah instrumen utama mobilitas vertikal ekonomi. Ketika anak-anak di pedesaan menerima kualitas pendidikan yang rendah, peluang mereka untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi atau mendapatkan pekerjaan dengan upah layak menjadi sangat terbatas. Akibatnya, kelompok masyarakat pedesaan akan tetap berada pada lapisan ekonomi bawah, sementara masyarakat perkotaan terus mengalami peningkatan kesejahteraan.

2) Penurunan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah

Keterbatasan akses teknologi dan minimnya fasilitas praktik di pedesaan menyebabkan angkatan kerja yang dihasilkan tidak memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri modern. Secara agregat, hal ini menurunkan produktivitas tenaga kerja wilayah tersebut secara keseluruhan dan menghambat pertumbuhan ekonomi makro.

3) Siklus Kemiskinan Antargenerasi

Ketimpangan ini berpotensi mengunci masyarakat pedesaan dalam lingkaran kemiskinan. Orang tua yang miskin di pedesaan tidak mampu mengakses pendidikan yang berkualitas untuk anak-anak mereka karena keterbatasan fasilitas daerah. Kurangnya kualitas pendidikan ini membuat sang anak kembali mendapatkan pekerjaan berpenghasilan rendah saat dewasa, sehingga kemiskinan terus diwariskan ke generasi berikutnya.

**Usulan Solusi Kebijakan untuk Mengurangi Ketimpangan**

Untuk mengatasi ketimpangan pendidikan struktural ini, diperlukan intervensi kebijakan yang terintegrasi dan berkeadilan:

1) Pemerataan dan Redistribusi Tenaga Pendidik

Pemerintah perlu menerapkan sistem mutasi guru profesional secara berkala atau memberikan insentif finansial dan tunjangan khusus yang signifikan bagi guru yang ditempatkan di wilayah pedesaan. Langkah ini penting untuk menjamin kesetaraan mutu pengajaran.

2) Standardisasi Fasilitas Melalui Digitalisasi Afirmatif

Mengingat keterbatasan geografis, pemerintah harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur digital dan penyediaan perangkat teknologi di sekolah-sekolah pedesaan. Program ini dapat didukung dengan penyediaan bahan ajar digital yang dapat diakses secara luring (*offline*) jika jaringan internet belum sepenuhnya stabil.

3) Alokasi Anggaran Berdasarkan Prinsip Keadilan Proporsional

Formula penyaluran bantuan operasional sekolah atau anggaran pembangunan daerah tidak boleh disamaratakan. Sekolah di pedesaan yang masuk kategori tertinggal harus mendapatkan porsi anggaran yang lebih besar untuk mengejar ketertinggalan fasilitas operasional dan sarana laboratorium dibandingkan sekolah di perkotaan yang mandiri.

### Soal 3 – Pengangguran Terdidik

Jumlah lulusan perguruan tinggi di Kota B meningkat setiap tahun. Namun, banyak lulusan menganggur atau bekerja tidak sesuai bidang studinya. Dunia industri menilai kompetensi lulusan belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

1. Analisis penyebab pengangguran terdidik berdasarkan teori *human capital*.

**Jawab:**

Berdasarkan teori *human capital* (modal manusia), investasi dalam pendidikan seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan produktivitas individu, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing mereka di pasar tenaga kerja. Namun, fenomena pengangguran terdidik di Kota B menunjukkan adanya kegagalan dalam proses konversi investasi tersebut. Penyebab utama kondisi ini dari sudut pandang teori modal manusia adalah ketidaksesuaian kualitas (*quality mismatch*) dan ketidaksesuaian jenis keterampilan (*skills mismatch*). Perguruan tinggi di Kota B tampaknya baru berhasil melakukan akumulasi modal manusia secara kuantitas, yaitu dengan meningkatkan jumlah lulusan, tetapi belum berhasil meningkatkan mutu kompetensi yang bernilai ekonomi. Nilai dari modal manusia yang dimiliki oleh para lulusan tidak mengalami apresiasi di mata sektor industri karena kompetensi yang mereka bawa dari bangku kuliah dianggap belum mencapai standar produktivitas yang diharapkan oleh pasar kerja modern.

2. Jelaskan hubungan antara pendidikan dan pasar kerja pada kasus tersebut.

**Jawab:**

Hubungan antara institusi pendidikan dan pasar kerja dalam kasus Kota B mencerminkan kondisi ketidakseimbangan struktural yang sering disebut sebagai fenomena *link and match*

yang terputus. Sisi penawaran tenaga kerja yang digerakkan oleh perguruan tinggi terus memproduksi lulusan dalam jumlah besar tanpa mempertimbangkan sinyal dan dinamika kebutuhan dari sisi permintaan tenaga kerja yang digerakkan oleh dunia industri. Akibat dari disorientasi ini adalah timbulnya pengangguran struktural dan penyerapan tenaga kerja yang tidak optimal, di mana lulusan terpaksa bekerja di luar bidang studinya. Ketika dunia industri menilai kompetensi lulusan belum sesuai dengan kebutuhan pasar, terjadi pemborosan sumber daya ekonomi karena biaya investasi pendidikan yang telah dikeluarkan tidak menghasilkan imbal balik berupa produktivitas kerja yang relevan bagi pembangunan daerah.

### **Rekomendasi Kebijakan untuk Meningkatkan Relevansi Lulusan**

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, langkah utama yang harus diambil adalah melakukan restrukturisasi kurikulum perguruan tinggi dengan melibatkan dunia industri secara aktif sejak tahap perencanaan hingga evaluasi pembelajaran. Kurikulum harus digeser dari yang semula berbasis teoretis normatif menjadi berbasis kompetensi dan adaptif terhadap perkembangan teknologi industri. Selain itu, pemerintah daerah bersama perguruan tinggi perlu menggalakkan program magang kerja yang terstruktur dan bersertifikasi kompetensi nasional, sehingga mahasiswa mendapatkan pengalaman riil di dunia kerja sebelum mereka lulus. Terakhir, perguruan tinggi juga harus memantau data perkembangan pasar kerja secara berkala, sehingga mereka bisa membatasi kuota jurusan yang peminatnya sudah terlalu jenuh dan membuka lebih banyak ruang untuk jurusan yang sedang tinggi permintaannya di dunia kerja.

### **Soal 4 – Kenaikan Biaya Pendidikan**

Sebuah universitas swasta menaikkan uang kuliah sebesar 25% untuk meningkatkan fasilitas kampus dan layanan akademik. Kebijakan tersebut mendapat protes dari mahasiswa karena dinilai memberatkan keluarga berpenghasilan rendah.

1. Analisis kasus tersebut berdasarkan konsep pendidikan sebagai barang publik dan barang privat.

#### **Jawab:**

Dari perspektif pendidikan sebagai barang privat, universitas swasta tersebut bertindak sebagai penyedia jasa yang menetapkan tarif berdasarkan kualitas yang ditawarkan. Karena berstatus swasta, operasional kampus sangat bergantung pada kontribusi pengguna (mahasiswa). Ketika kampus ingin meningkatkan fasilitas dan layanan akademik, biaya

tersebut dibebankan kepada mahasiswa yang nantinya akan menikmati manfaat personal langsung, seperti peningkatan keahlian dan peluang kerja yang lebih baik setelah lulus. Namun di sisi lain, jika memandang pendidikan sebagai barang publik, kebijakan menaikkan biaya kuliah sebesar 25% ini menimbulkan masalah besar. Pendidikan tidak boleh hanya dilihat sebagai komoditas bisnis, karena pendidikan menghasilkan dampak positif bagi masyarakat luas, seperti pengurangan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM daerah. Ketika biaya kuliah naik terlalu tinggi hingga tidak terjangkau oleh keluarga berpenghasilan rendah, fungsi pendidikan sebagai barang publik yang inklusif menjadi terganggu. Akses pendidikan tinggi akhirnya hanya bisa dinikmati oleh kelompok ekonomi mampu, sehingga meningkatkan kesenjangan sosial.

2. Jelaskan dampak sosial ekonomi dari kenaikan biaya pendidikan.

**Jawab:**

Kenaikan biaya pendidikan yang signifikan ini memiliki dampak berantai yang cukup besar bagi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dampak ekonomi langsungnya adalah meningkatnya beban finansial keluarga, khususnya kelompok kelas menengah ke bawah, yang terpaksa memotong anggaran kebutuhan pokok lain demi membayar kuliah. Dalam kondisi yang lebih buruk, kenaikan ini dapat meningkatkan angka putus kuliah (*drop-out*) karena ketidakmampuan bayar, atau memaksa calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk mengurungkan niat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Secara sosial, fenomena ini akan menurunkan tingkat mobilitas vertikal di masyarakat. Pendidikan yang seharusnya menjadi alat utama bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk memperbaiki nasib dan keluar dari lingkaran kemiskinan justru berubah menjadi pembatas. Akibatnya, struktur sosial menjadi kaku, di mana peluang untuk mendapatkan pekerjaan bagus hanya berputar di kalangan yang memiliki modal finansial kuat sejak awal. Hal ini berpotensi meningkatkan kecemburuan sosial dan memperburuk ketimpangan ekonomi jangka panjang di daerah tersebut.

3. Apakah pemerintah perlu melakukan intervensi? Jelaskan alasannya.

**Jawab:**

Pemerintah sangat perlu melakukan intervensi dalam kasus ini, meskipun peristiwa tersebut terjadi di ranah universitas swasta. Alasan utamanya adalah karena konstitusi mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dan pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin keadilan akses tersebut. Jika

pemerintah membiarkan mekanisme pasar bebas sepenuhnya mengatur biaya pendidikan swasta, maka perguruan tinggi akan menjadi ruang yang eksklusif bagi orang kaya saja. Intervensi pemerintah di sini bukan berarti mengekang perkembangan kampus swasta, melainkan menjaga keseimbangan agar hak masyarakat kurang mampu tetap terlindungi. Bentuk intervensi yang bisa dilakukan pemerintah pun cukup beragam dan tidak harus berupa pemaksaan penurunan tarif. Pemerintah dapat menyediakan skema bantuan kuota beasiswa afirmatif (seperti KIP Kuliah) yang dialokasikan khusus untuk mahasiswa kurang mampu di kampus swasta tersebut. Selain itu, pemerintah bisa memberikan insentif berupa hibah fasilitas atau keringanan pajak bagi universitas swasta yang berkomitmen menyediakan kuota minimal bagi mahasiswa berpenghasilan rendah. Melalui intervensi yang tepat, universitas swasta tetap bisa meningkatkan mutu layanannya tanpa harus mengorbankan aksesibilitas bagi kelompok masyarakat bawah.

### **Soal 5 – Digitalisasi Pembelajaran**

Pasca pandemi, sekolah menerapkan pembelajaran berbasis digital. Namun, siswa dari keluarga kurang mampu mengalami kesulitan membeli perangkat dan kuota internet sehingga partisipasi belajar menurun.

1. Analisis masalah tersebut menggunakan konsep biaya pendidikan dan *opportunity cost*.

#### **Jawab:**

Jika dianalisis dari konsep biaya pendidikan, kebijakan digitalisasi pasca-pandemi ini secara tidak langsung telah menggeser beban biaya operasional pendidikan dari sekolah ke ranah privat atau keluarga siswa (*private costs*). Biaya pendidikan tidak lagi hanya sebatas uang sekolah atau buku cetak, melainkan meluas ke komponen biaya tambahan yang cukup besar, yaitu pengadaan gawai yang memadai dan kuota internet rutin. Bagi keluarga kurang mampu, pengeluaran baru ini menjadi beban finansial yang sangat berat karena sifatnya yang wajib demi keberlangsungan proses belajar anak.

Sementara itu, jika dilihat dari sudut pandang *opportunity cost* (biaya peluang), situasi ini memaksa keluarga kurang mampu membuat pilihan ekonomi yang sulit. Ketika pendapatan mereka terbatas, biaya peluang dari membeli kuota internet dan perangkat digital adalah mengorbankan pemenuhan kebutuhan pokok lain yang tidak kalah mendasar, seperti pemenuhan nutrisi pangan atau kesehatan keluarga. Di sisi lain, bagi siswa itu sendiri, ketika mereka memilih tetap bersekolah di tengah keterbatasan digital, ada biaya peluang berupa hilangnya potensi waktu yang bisa digunakan untuk membantu perekonomian keluarga.

Karena *opportunity cost* untuk bertahan di sekolah digital dinilai terlalu tinggi dan memberatkan, partisipasi belajar siswa dari kelompok ini akhirnya menurun.

2. Jelaskan dampak kesenjangan digital terhadap kualitas pendidikan.

**Jawab:**

Kesenjangan digital yang terjadi di tengah proses digitalisasi pembelajaran membawa dampak buruk yang nyata bagi kualitas pendidikan secara sistemik. Dampak paling mendasar adalah terjadinya ketimpangan mutu hasil belajar siswa berdasarkan status sosial ekonominya. Siswa dari keluarga mampu dapat memanfaatkan teknologi digital untuk mengeksplorasi materi belajar tanpa batas, sehingga kualitas pemahaman mereka meningkat pesat. Sebaliknya, siswa kurang mampu yang terkendala perangkat dan kuota akan mengalami kemunduran akademis karena mereka kehilangan akses ke materi pembelajaran yang beralih ke ruang digital.

Kondisi ini pada akhirnya menurunkan kualitas sistem pendidikan nasional karena memperlebar kesenjangan prestasi. Digitalisasi yang awalnya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan modernisasi pembelajaran justru berubah menjadi alat penyaring yang meminggirkan kelompok rentan. Proses belajar-mengajar menjadi tidak inklusif, dan standar kualitas pendidikan di suatu daerah tidak lagi ditentukan oleh kurikulum atau kemampuan guru, melainkan oleh seberapa mampu siswa membeli akses teknologi pendukungnya.

**Solusi Kebijakan untuk Mengatasi Masalah Tersebut**

Untuk mengatasi dampak negatif digitalisasi bagi kelompok rentan, pemerintah bersama institusi sekolah perlu mengambil langkah kebijakan yang bersifat afirmatif dan inklusif:

1) Pemberian Subsidi Sektor Digital Khusus Mahasiswa/Siswa Rentan

Pemerintah daerah melalui anggaran pendidikan perlu menghidupkan kembali program bantuan kuota internet belajar gratis yang disasarkan secara spesifik (berdasarkan data kemiskinan terpadu) agar tepat sasaran, serta bekerja sama dengan produsen teknologi untuk menyediakan gawai subsidi atau program pinjam pakai gawai oleh pihak sekolah.

2) Pembangunan Infrastruktur Digital Corner di Sekolah

Sekolah-sekolah harus mengoptimalkan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membangun fasilitas ruang komputer dan jaringan internet gratis yang dapat diakses oleh siswa kurang mampu di luar jam kelas, sehingga mereka tetap bisa mengunduh materi dan tugas tanpa harus membeli kuota di rumah.

### 3) Penerapan Sistem Pembelajaran Hybrid yang Fleksibel

Sekolah tidak boleh sepenuhnya mematikan akses pembelajaran konvensional. Harus ada kebijakan alternatif di mana materi digital tetap disediakan dalam bentuk cetak (modul fisik) bagi siswa yang benar-benar tidak memiliki perangkat, dan proses evaluasi atau pengumpulan tugas bagi siswa tersebut diberikan kelonggaran agar dilakukan secara luring (*offline*) demi menjaga keadilan partisipasi belajar.